

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Setelah penjabaran data lengkap pada bab-bab sebelumnya, peneliti mengambil kesimpulan bahwa Indonesia memiliki beberapa strategi dalam meningkatkan ekonomi digital dalam implementasi kerja sama QR code lintas batas di Asia Tenggara tahun 2020-2025. Strategi tersebut tercantum dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 dan 2030 yang diluncurkan oleh Bank Indonesia. Dalam pelaksanaan strateginya, Bank Indonesia selaku penyelenggara dan regulator sistem pembayaran berkolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, kementerian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta pihak bank maupun nonbank (perusahaan finansial). Strategi yang tercantum dalam BSPI 2025 dan 2030 bersifat *forward-looking* atau berwawasan kedepan bagi sistem pembayaran. Strategi yang ada terbagi menjadi strategi dalam lingkup domestik dan regional. Strategi domestik dijalankan untuk meratakan tingkat inklusi dan integrasi sistem pembayaran di dalam negeri sebagai indikator kesiapan sebelum melangkah ke integrasi sistem pembayaran di level regional. Sementara strategi yang dilakukan dalam lingkup regional dilakukan untuk semakin memperluas jangkauan sistem pembayaran QR melalui penyalarsan regulasi sistem pembayaran sehingga integrasi regional dapat terwujud. Berkembangnya fintech di wilayah negara berkembang seperti Asia didasari oleh tujuan untuk mencapai pembangunan ekonomi serta meningkatkan inklusi keuangan. Sehingga, Indonesia menstrategikan pembangunan ekonomi digital melalui kerja sama QR code lintas batas bersama negara-negara kawasan Asia Tenggara.

Strategi Indonesia pada skala domestik dimulai dengan pembuatan kebijakan terkait open banking untuk mendorong integrasi pembayaran antar platform seperti bank dan perusahaan fintech. Kebijakan tersebut diimplementasikan oleh BI melalui Standar Nasional Open API (SNAP) pada 16 Agustus 2021. Strategi berikutnya yakni memantapkan infrastruktur sistem pembayaran baik itu *front-end*, *middle-end*, maupun *back-end* melalui peluncuran

BI-FAST dan QRIS yang berstandar EMVCo serta adopsi standar ISO 20022. Pengembangan infrastruktur sistem pembayaran dilakukan untuk membuat proses integrasi pembayaran domestik menjadi rata dan menyeluruh. Selanjutnya, Bank Indonesia melakukan seleksi serta menunjuk langsung Penyedia Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang telah layak untuk menyelenggarakan layanan pembayaran QRIS serta melakukan kolaborasi bersama ASPI dan PJSP dalam melakukan sosialisasi dan edukasi terkait QRIS. Edukasi dan kampanye langsung tentang QRIS juga dilakukan oleh Bank Indonesia melalui berbagai *event* dan publikasi seperti Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI), Festival Ekonomi Syariah (FESYAR), *Indonesia Sharia Economic Festival* (ISEF), dan Karya Kreatif Indonesia (KKI).

Strategi Indonesia pada skala regional yakni dimulai dengan melakukan *agenda setter* dengan membawa inisiasi G20 terkait ekonomi digital pada Keketuaan ASEAN 2023. Indonesia mendukung penggunaan mata uang lokal di Asia Tenggara melalui implementasi skema *Local Currency Transaction* (LCT). Skema tersebut dijalankan guna meningkatkan *interlinking* serta konektivitas pembayaran lintas batas ASEAN. Selanjutnya, Indonesia menjadi inisiator dalam kerja sama metode pembayaran berbasis QR code atau QRIS Antarnegara yang dimulai bersama Thailand, Malaysia, dan Singapura. Tahapan kerja sama QRIS Antarnegara dimulai dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) dan *Non-Disclosure Agreement* (NDA) yang diwakili oleh masing-masing bank sentral, fase uji coba, dan implementasi. Bank Indonesia serta bank sentral dari negara-negara mitra juga menunjuk sejumlah bank sebagai *Appointment Cross Currency Dealer* (ACCD) untuk memfasilitasi *direct quotation*.

Pada skala regional, Indonesia juga mengupayakan kerja sama *cross border payment* lewat skema *Regional Payment Connectivity* (RPC). RPC mendukung integrasi keuangan yang bertujuan untuk membuat pembayaran menjadi lebih mudah dan efisien. Tahapan skema RPC dimulai dengan penandatanganan MoU oleh lima gubernur bank sentral dari Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina pada 14 November 2022, hingga tahapan implementasi berupa *piloting* dan harmonisasi regulasi. Indonesia memanfaatkan forum ASEAN untuk membentuk integrasi ekonomi kawasan karena menjadi salah satu komponen terbentuknya

integrasi ekonomi di suatu kawasan. Dokumen deklarasi *ASEAN Concord IV* menjadi dasar utama terbentuknya kerja sama RPC. Tetapi karena kerja sama finansial kawasan seperti skema RPC dan QR code lintas batas bersifat *open regionalism*, maka diperlukan adanya koordinasi regional untuk mencapai harmonisasi kebijakan ekonomi seperti sistem pembayaran oleh negara-negara di kawasan ASEAN. Strategi berikutnya, Bank Indonesia selaku bank sentral terus berupaya menyempurnakan kemampuan infrastruktur pembayaran yang mendukung lintas batas seperti BI-RTGS generasi tiga. Karena negara dengan sistem keuangan yang maju akan mendapatkan dampak positif dari integrasi keuangan.

Ekonomi digital memberikan manfaat nyata seperti meningkatkan efisiensi dan efektivitas, mendorong kolaborasi, serta memperkuat konektivitas antar pihak sehingga strategi Indonesia untuk memaksimalkan ekonomi digital sudah tepat dengan adanya manfaat signifikan. Muncul banyak perusahaan dompet digital, bank ataupun nonbank yang telah menyediakan metode pembayaran berbasis QR. Volume transaksi QRIS baik *inbound* maupun *outbound* terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. QR code lintas batas memberikan kemudahan bagi transaksi lintas batas. QR code lintas batas menjadi salah satu instrumen pendorong ekonomi digital. Meskipun demikian, pada implementasinya masih terdapat beberapa faktor penghambat seperti belum meratanya kesiapan infrastruktur serta perbedaan regulasi keuangan masing-masing negara di kawasan.

6.2. Saran

6.2.1. Saran Teoritis

Saran teoritis yang dapat penulis berikan tertuju kepada peneliti selanjutnya. Penulis menyarankan peneliti selanjutnya untuk mendapatkan sumber data dari pihak-pihak terkait seperti Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) melalui wawancara langsung. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih dalam kebijakan dan strategi yang telah ada untuk melihat efektivitasnya secara langsung terhadap ekonomi digital. Disarankan juga untuk mengkaji topik serupa dengan pendekatan kuantitatif atau campuran.

6.2.2. Saran Praktis

Saran praktis yang dapat penulis berikan dari hasil penelitian ini tertuju kepada pemerintah Indonesia. Penulis menyarankan pemerintah Indonesia agar terus meningkatkan kualitas internet dan jaringan di Indonesia serta infrastruktur sistem pembayaran supaya segenap masyarakat dapat merasakan manfaat dari ekonomi digital yang lebih merata. Penulis juga menyarankan kepada pihak terkait dari negara-negara ASEAN untuk secara kompak berkolaborasi dalam mewujudkan konektivitas pembayaran melalui pembuatan lembaga atau organisasi formal dan standarisasi kebijakan supaya kerja sama sistem pembayaran khususnya QR code dapat diperluas di dalam hingga luar ASEAN.